

**Analisis Manajemen Risiko Rencana Pembangunan Bendungan Pelosika
Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara**
*Risk Management Analysis of the Pelosika Dam Development Plan in Konawe Regency,
Southeast Sulawesi Province*

Santy Sriharyati¹, Poniah Juliawati², Andina Dwijayanti³

Administrasi Bisnis^{1, 2, 3}

Politeknik LP3I^{1, 2, 3}

e-mail: santysriharyati@plb.ac.id¹, iponjuliawati@plb.ac.id², andinadwijayanti@plb.ac.id³

Abstract: *The Pelosika Dam construction plan is located on the Konawehe river, Puriosu Asinua Jaya Village, Asinua District, Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. Pelosika Dam with a storage of up to 800 million m³ is a very high risk irrigation infrastructure facility, before being followed up into the construction implementation stage, first the results of the design that has been carried out must get approval and the need for Risk Management Analysis. Secondary data collection method is a method of collecting data from plan documents, laws and regulations and data related to Pelosika Dam Development activities. Research method with a qualitative approach with a grounded approach. Primary Data Collection Methods, carried out by structured interview techniques, field observations, distributing questionnaires and Company archives. The results showed a priority scale related to risk mitigation, where there are several components that are high risk, namely related to land acquisition and land works during the construction plan, land works in the impact after construction. The results of risk mitigation that the issue of land acquisition is a crucial issue, there needs to be an update related to land acquisition documents in accordance with the needs of Pelosika Dam construction and price adjustments. Documents are made in reference to the latest regulations regarding DPPT (Land Acquisition Planning Document). As well as involving affected residents in the Pelosika Dam development process in accordance with adequate human resources (HR).*

Keywords : *Risk Management, Land Acquisition and Dam*

Abstrak: Rencana pembangunan Bendungan Pelosika terletak di sungai Konawehe, Puriosu Desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bendungan Pelosika dengan tampungan yang mencapai 800 juta m³ merupakan sarana prasarana pengairan yang beresiko sangat tinggi, sebelum ditindaklanjuti ke dalam tahapan pelaksanaan konstruksi, terlebih dahulu hasil desain yang telah dilakukan harus mendapatkan persetujuan dan perlu dilakukannya Analisis Manajemen Risiko. Metode Pengumpulan data sekunder merupakan metode mengumpulkan data dari dokumen-dokumen rencana, peraturan perundangan serta data terkait dengan kegiatan Pembangunan Bendungan Pelosika. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan *grounded*. Metode Pengumpulan Data Primer, dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, observasi lapangan, penyebaran kuesioner dan arsip Perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan skala prioritas terkait mitigasi risiko, dimana ada beberapa komponen yang menjadi risiko tinggi yaitu terkait pembebasan lahan dan lahan pekerjaan pada saat rencana pembangunan, lahan pekerjaan dalam dampak setelah pembangunan. Hasil mitigasi resiko bahwa isu pembebasan lahan merupakan isu krusial, perlu ada pemutakhiran terkait

dokumen pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan Bendungan Pelosika dan penyesuaian harga. Dokumen dibuat mengacu pada peraturan terbaru mengenai DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah). Serta melibatkan warga terkena dampak pada proses pembangunan Bendungan Pelosika sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembebasan Lahan dan Bendungan

PENDAHULUAN

Salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia khususnya pada Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pembangunan Bendungan Pelosika adalah di Sungai Konawe. Rencana pembangunan Bendungan Pelosika terletak di sungai Konawe, lokasi Puriosu Desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Konawe merupakan salah satu dari 12 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan terletak sekitar 80 km sebelah barat ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditinjau dari letak geografis Kabupaten Konawe, merupakan daerah cekungan / datar yang rawan terhadap bencana banjir tetapi mempunyai potensi lahan yang dapat dikembangkan. Salah satu lahan potensial untuk pengembangan daerah irigasi baru, dan irigasi yang ada (eksisting) yaitu Daerah Irigasi Wawotobi, sebagai penghasil beras (lumbung padi) daerah penyangga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Permasalahannya adalah frekuensi sering banjir akibat meluapnya sungai Konawe pada musim penghujan yang melanda daerah irigasi Wawotobi yang mengakibatkan berkurangnya produksi padi, dan kecamatan Pondidaha yang merupakan pertemuan Sungai Konawe dan Sungai Lahumbuti. Adanya kebijakan pemerintah untuk ketahanan pangan dengan mengoptimalkan daerah irigasi yang ada (eksisting) dan pengembangan potensi daerah irigasi yang baru.

Pertimbangan perlunya pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air. Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara geografis mempunyai luas daerah irigasi yang cukup luas

dan potensi air yang cukup besar di Sungai Konawe dan belum dimanfaatkan secara optimal. Berbagai upaya telah dilakukan seperti intensifikasi pertanian dan sebagainya ternyata harus diikuti dengan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dan drainase untuk meningkatkan intensitas tanam dan mencegah kegagalan panen akibat banjir/kekeringan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan untuk industri perlu pasokan tenaga listrik yang mencukupi, permasalahannya di Sulawesi Tenggara terjadi kekurangan (defisit) tenaga listrik, untuk itu perlu adanya tambahan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu mencari alternatif untuk penambahan pasokan tenaga listrik diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Menyadari akan hal tersebut serta adanya dukungan kuat dari pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, maka Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV merencanakan pembangunan Bendungan Pelosika yang berfungsi serba guna (multifungsi), diantaranya; Pengembangan Irigasi (intensifikasi dan ekstensifikasi) seluas 30.583 Ha, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, penyediaan air baku untuk air bersih, perikanan, pariwisata dan sarana olah raga.

Tahapan rencana pembangunan Bendungan Pelosika sedang dalam tahapan perencanaan dan telah dilakukan detail desain. Mengingat Bendungan Pelosika dengan tampungan yang mencapai 800 juta m³ merupakan sarana prasarana pengairan yang mempunyai resiko sangat tinggi, maka sebelum ditindaklanjuti ke dalam tahapan pelaksanaan konstruksi, terlebih dahulu hasil desain yang telah dilakukan harus mendapatkan persetujuan desain yang diberikan

dari Komisi Keamanan Bendungan serta perlu dilakukannya Analisis Manajemen Risiko.

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan rencana tentang tahapan pelaksanaan rencana kegiatan mengenai kondisi lingkungan yang terkena dampak pembangunan bendungan dan rencana pemulihan produktifitas penduduk sedangkan tujuan dari analisis manajemen risiko ini yaitu:

1. Sebagai siklus proses penelaahan yang dilakukan secara sistematis manajemen risiko atas dampak sosial yang ditimbulkan dan beroperasinya konsesi pengelolaan.
2. Mengidentifikasi mitigasi risiko dalam menyusun rencana tindak pengelolaan dan pemantauannya untuk menjamin kepastian agar keberadaannya dapat berlanjut (*sustain*) dan berkeselimbangan.

Manajemen Risiko Pembangunan Bendungan

Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan manajemen risiko menggambarkan tentang bagaimana manajemen risiko disusun dan dilaksanakan dengan baik dalam sebuah proyek konstruksi. Keberhasilan proyek diukur melalui tiga sasaran proyek, yaitu biaya, kualitas dan waktu.

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko ialah proses peninjauan seluruh risiko untuk dianalisis dan diketahui respon risiko yang dilakukan, agar tidak berdampak buruk bagi proyek. Kategori dan peristiwa/bentuk risiko yang dapat terjadi pada Pembangunan Bendungan (dapat berkembang sesuai tipologi dan tujuan Pembangunan Bendungan) adalah sebagai berikut antara lain Risiko finansial, Risiko hukum, Risiko politik, Risiko sosial, Risiko lingkungan, Risiko konstruksi, Risiko operasi, Risiko *force majeure*. Risiko dan peristiwa/bentuk risiko tersebut diatas, dapat berkurang atau bertambah tergantung dari tipologi dan tujuan dari pemilik proyek Pembangunan Bendungan.

Analisis Risiko (*Risk Analysis*)

Analisa risiko merupakan proses mencari informasi/deskripsi lebih spesifik terhadap risiko yang telah diidentifikasi meliputi kuantifikasi risiko dalam probabilitas, penyebab terjadinya dan keterkaitan risiko. Sedangkan perkiraan dampak risiko menyelidiki tentang efek yang potensial mempengaruhi kualitas konstruksi seperti waktu, harga dan mutu pekerjaan. Salah satu metode menentukan dampak risiko adalah menggunakan kriteria *Australian/New Zealand Standard 'Risk Management'*, sebagaimana digambarkan pada tabel 1.

Rencana pembangunan Bendungan Pelosika terletak di sungai Konawe, Puriosu Desa Asinua Jaya, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bendungan Pelosika dengan tampungan yang mencapai 800 juta m³ merupakan sarana prasarana pengairan yang beresiko sangat tinggi, sebelum ditindaklanjuti ke dalam tahapan pelaksanaan konstruksi, terlebih dahulu hasil desain yang telah dilakukan harus mendapatkan persetujuan perlu dilakukannya Analisis Manajemen Risiko. Metode Pengumpulan data sekunder merupakan metode mengumpulkan data dari dokumen-dokumen rencana, peraturan perundangan serta data terkait dengan kegiatan Pembangunan Bendungan Pelosika. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan *grounded*.

Metode Pengumpulan Data Primer, dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, observasi lapangan, penyebaran kuesioner dan arsip Perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan menunjukan skala prioritas terkait mitigasi risiko, dimana ada beberapa komponen yang menjadi risiko tinggi yaitu terkait pembebasan lahan dan lahan pekerjaan pada saat rencana pembangunan, lahan pekerjaan dalam dampak setelah pembangunan.

Tabel 1. Matriks Tingkat Risiko

Skala Probabilitas	Skala Dampak				
	Significant (1)	Minor (2)	Medium (3)	Mayor (4)	Catastrophic (5)
Sangat besar (5)	5	10	15	20	25
Besar (4)	4	8	12	16	20
Sedang (3)	3	6	9	12	15
Kecil (2)	2	4	6	8	10
Sangat Kecil (1)	1	2	3	4	5

Indeks level risiko dikelompokkan ke dalam empat tingkatan kelas yaitu:

1. Risiko sangat tinggi, dengan rentang nilai 20-25 dan diberi warna merah
2. Risiko tinggi dengan rentang nilai 16-19 dan diberi warna orange
3. Risiko sedang dengan rentang nilai 11-15 dan diberi warna kuning
4. Risiko rendah, dengan rentang nilai 6-10 dan diberi warna hijau.
5. Risiko sangat rendah, dengan rentang nilai 1-5 dan diberi warna biru

Evaluasi terhadap risiko dalam suatu proyek konstruksi termasuk Pembangunan Bendungan tergantung pada probabilitas terjadinya risiko atau frekuensi kejadian dan dampak dari risiko tersebut. Dalam membandingkan berbagai risiko untuk mengetahui tingkat nilai risiko (*Value Risk*) maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Risiko} = \text{Frekuensi} \times \text{Dampak}$$

Keterangan:

Frekuensi: Probabilitas seringnya risiko tersebut terjadi

Dampak: Penilaian pengaruh risiko terhadap biaya dan waktu proyek

Probabilitas merupakan peluang atau kemungkinan terjadinya suatu risiko yang didasarkan pada tahapan proses analisis statistik (*experience judgement*), oleh sebab itu penilaian probabilitas akan tergantung dari pemahaman risk owner. Rating Probabilitas adalah mulai sangat kecil sampai dengan sangat besar yakni berkisar antara nilai satu sampai dengan lima.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data secara umum terbagi dua yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data sekunder merupakan metode mengumpulkan data dari dokumen-dokumen rencana, peraturan

perundangan serta data terkait dengan kegiatan Pembangunan Bendungan Pelosika. Metode Pengumpulan Data Primer, dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, observasi lapangan, penyebaran kuesioner dan arsip perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara Terstruktur. Metode kualitatif dengan pendekatan grounded. Pengumpulan data primer dengan wawancara terstruktur untuk mendapat informasi terkait analisis risiko rencana Pembangunan Bendungan Pelosika. Penentuan responden melalui metode Purposive Sampling yaitu, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yaitu adalah dinas terkait.
2. Desk Study, dilakukan analisa terhadap dokumen-dokumen berupa catatan lapangan dan fisik sarana prasarana yang berada di Lokasi Rencana Pembangunan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan data yang berbeda yaitu dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif, digunakan dalam menganalisis data berupa hasil wawancara dan data hasil observasi lapangan.

PEMBAHASAN

Rencana Pembangunan Bendungan

Secara umum berdasarkan hasil survey yang dilakukan di lokasi terdampak maupun sekitar lokasi terdampak. Sebagian besar informan mengetahui rencana pembangunan Bendungan Pelosika yang merupakan proyek terbesar yang berada di Indonesia Timur dan berada di wilayah Latoma tua atas. Informasi rencana pembangunan Bendungan Pelosika tersebut didapatkan dari masyarakat, kecamatan dan pemerintah setempat maupun langsung dari Provinsi, ada juga yang pernah mengikuti rapat di Kabupaten bahkan pernah ada sosialisasi dengan anggota DPR. Sebagian ada yang mendapatkan informasi dari media sosial, kecamatan, wartawan dan teman-teman desa yang ada di seluruh Kabupaten Konawe.

Sejak 2016 informasi rencana pembangunan Bendungan Pelosika sudah ada, dan ketika

sosialisasi itu langsung dari pusat. Rencana proyek Pelosika katanya sudah dari tahun 1985 namun terrealisasi baru sekarang. Bendungan ini diharapkan dapat terlaksana karena sudah hampir 12 tahun belum ada kejelasan dan malah banyak isu-isu yang tidak jelas.

Pembangunan Bendungan Pelosika menurut salah satu informan ada nilai positif dan nilai negatif. Nilai positifnya pemerintah sudah mempersiapkan secara baik dalam melaksanakan program ini. Tapi sisi negatifnya kita harus memulai semuanya dari awal lagi, pasti akan ada masa-masa penyesuaiannya. Harapannya semoga dengan adanya pembangunan ini bisa merubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. program ini baik dan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat yang terdampak. .Sebagai aparat pemerintah setempat menerima, mau di apa kalau memang pemerintah pusat yang minta. Masyarakat berharap menerima ganti untung yang sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Bendungan ini khususnya di wilayah Asinua, Latoma, Padangguni, dan Abuki jika sudah tergenang air maka akan bermanfaat sekali bagi masyarakat yang ada disana dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terdampak. Namun kekhawatiran bagi warga terdampak dari Bendungan Pelosika nantinya, terutama lahan yang dibagian bawah desa ini (persawahan). Jika wacana penambahan debit air maka akan tenggelam, hal ini dikarenakan ketika hujan di wilayah kami, air sungai itu akan meluap dan merendam lahan pertanian kami. Dan kedepannya jika bendungan sudah ada dan terjadi penambahan debit air maka sawah ini kan lahan permanen maka akan berubah jadi genangan semua. Warga terdampak tidak ada atau menghalangi program pemerintah hanya kami terkena dampak juga dan jika ada solusi masyarakat hanya meminta ada pembuangan air atau saluran air (irigasi).

Tanggapan dari sisi positif karena salah satu faktor utama meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya dari bendungan ini, kemudian pembangunan di wilayah Konawe akan merata jika sudah terbangun bendungan Pelosika ini. Untuk dari sisi lapangan pekerjaan

akan meningkat dan mungkin akan tidak ada lagi pengangguran dan sektor pariwisata juga. Dari sisi negatifnya sedikit. Namun setelah ganti untung selesai dan proses relokasi.

Proses Bendungan Pelosika ini diharapkan jadi dan cepat terlaksana, agar pelaksanaan dan pengelolaannya dilakukan dengan baik, bermanfaat untuk masyarakat banyak karena ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan bendungan ini akan menjadi objek wisata, PLTA, pertanian dan dampaknya akan dirasakan masyarakat. bendungan ini dapat mengakomodir kebutuhan air untuk lahan pertanian masyarakat.

Air ini bisa disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, dan kami juga mengharapkan dibuatkan saluran khusus agar lahan pertanian kami aman. Hal ini dikarenakan, sudah mengalami gagal panen selama 2 tahun, dan mengharapkan segera membuat saluran irigasi agar tidak terjadi lagi banjir di lahan pertanian masyarakat dan dapat meningkatkan taraf ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang terdampak. Penggunaan listrik sangat bermanfaat bagi masyarakat. Harapan lainnya yaitu sebelum proyek dimulai akses jalan segera diperbaiki, agar akses masyarakat menjadi lebih mudah.

Adanya bendungan ini masyarakat diberikan perhatian dan diprioritaskan kedepannya agar penghidupannya lebih bagus lagi, yang penting jangan merugikan masyarakat. Dengan adanya pembangunan ini tidak merugikan masyarakat terdampak, salah satunya dengan melibatkan masyarakat yang terdampak untuk diprioritaskan dan dapat dilibatkan atau dipekerjakan dalam pembangunan

Perihal ganti rugi ini akan menjadi masalah yang besar nanti ketika dilapangan. Penggantian ganti ruginya jelas, adil dan tidak merugikan masyarakat. Proses ganti rugi tidak melibatkan pihak ketiga, inginnya langsung antara masyarakat yang terdampak dengan pihak perusahaan. Proses ganti untung harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan.

Relokasi harus jelas dan ganti untung harus setara dengan kondisi sekarang, dan lahan yang terkena dampak cukup luas, masyarakat hanya ingin mengetahui dimana masyarakat akan di relokasi sekurang-kurangnya dibuatkan perumahan layak huni. Supaya mengetahui akan dipindahkan dimana, karena sampai sekarang lokasi relokasi.

Menurut dokumen dalam pengadaan tanah pada tahun 2015 hanya 23 desa, 4 kecamatan, dan 2 kabupaten namun pada peta administrasi terbaru saat ini ada perubahan terkait data terdampaknya yaitu menjadi 8 kecamatan yang terdampak dan 38 desa, jumlah desa terdampak menjadi lebih banyak dikarenakan desa yang sebelumnya mengalami pemekaran.

Sebagian besar wilayah terdampak merupakan bukan bagian dari kawasan wilayah adat maupun masyarakat adat, hanya masyarakat biasa. Sebagian besar hanya pemukiman masyarakat biasa. Kalau untuk kampung adat ada regulasi yang mengatur itu, kalau disini belum ada. Hanya tanah leluhur saja. Dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat karena tidak terdampak. Mengganggu aktifitas mungkin tidak, hanya mengganggu lahan pertanian kami jika terjadi penambahan debit air nanti. Namun ada pula yang berpendapat, tentu mengganggu aktifitas masyarakat apabila program ini sudah berjalan. Sebagian masyarakat sudah mendukung, walaupun tidak mendukung hanya sedikit, perlu adanya pemberian pemahaman. Di salah satu desa, sebenarnya dari dulu sudah ada yang menolak, tapi hal tersebut dapat ditangani oleh pemerintah desa setempat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pada awalnya hampir semua tidak setuju tapi lambat laun dengan diberikannya pemahaman dan edukasi kepada masyarakat akhirnya bisa berkurang juga masyarakat yang tidak setuju

Dari pihak desa, biar bagaimanapun kita tidak bisa melarang program pemerintah karena pasti program ini memiliki manfaat. Jadi, masyarakat juga harus mendukung dan setuju terhadap program ini. Kalau untuk surat kepemilikan kami selaku pemerintah desa siap membantu masyarakat yang belum memiliki surat-surat.

Walaupun pada awalnya sempat menolak karena itu ada pro dan kontra pada masyarakat, namun hal tersebut dapat diatasi oleh lembaga-lembaga dan pemerintah dengan memberikan penjelasan dan pemahaman pada masyarakat yang kontra serta kita harus menerima karena ini program pemerintah, dengan memberikan contoh kasus pada beberapa bendungan yang sudah jadi seperti Jatiluhur dapat berhasil. Masyarakat pun menyampaikan ketika proses ganti ungunya harus sesuai dengan wilayah lain. Karena jika proses dalam ganti untung tidak sesuai atau merugikan warga terdampak akan bermasalah karena ada sengketa dan sebagainya.

Proses relokasi di salah satu desa terdampak, apabila ada program relokasi sebaiknya ke tempat yang lebih baik, tapi ketika nanti proses relokasinya tidak jelas dari pemerintah pasti itu akan ada kontra yang tidak senang tentu mengganggu aktifitas karena jarak sungai sangat dekat dengan desa kami dan pasti desa kami akan terendam.

Pelibatan tokoh adat tentunya harus dilibatkan dalam pembangunan Bendungan Pelosika ini. Walaupun ada desa yang tidak ada warganya terdampak, karena wilayahnya cukup jauh dari lokasi, apabila jadi dibangun tentunya akan merasakan manfaatnya juga, mungkin nanti jika Bendungan Pelosika jadi dibangun dan dapat mengairi Sungai Lambuti atau sungai lainnya dan itu bisa mengairi wilayah kami, kami pun akan senang sekali, karena debit air di Asolu akan besar begitu. Akan lebih baik lagi jika masyarakat lokal dilibatkan sebagai tenaga kerja untuk pembangunan bendungan. Dari hasil survei dilapangan menunjukkan ada beberapa aspek dampak pembangunan Bendungan Pelosika antara lain :

Perubahan Mata Pencaharian

Jenis mata pencaharian warga yang terkena dampak umumnya petani yaitu sekitar 81% warga menggeluti pekerjaan antara lain sebagai petani coklat, petani lada dan lain-lain. Dan 11% lainnya adalah sebagai PNS, sementara 8% sisanya adalah pedagang dan pencari hasil hutan seperti pencari rotan dan madu. Dari jenis pekerjaan yang ditekuni warga memberikan

gambaran tentang sumber pendapatan warga yang diperoleh dan pola hidup warga.

Dapat diperoleh data bahwa 58,82% dari responden menyatakan adanya proyek dapat menguntungkan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar sebagian dari warga terdampak dapat melihat peluang yang lebih baik jika ada pembangunan Bendungan Pelosika sampai nanti beroperasi. Pernyataan ini didukung oleh adanya pengakuan bahwa proyek tersebut diyakini ada manfaatnya (56,86%) meskipun diakui bahwa nanti dapat merubah mata pencaharian warga terdampak sampai 35,14%. Sehingga 52% warga mengharapkan dapat merubah penghasilan keluarga yang lebih baik.

Perubahan Pendapatan Ekonomi

Kegiatan perekonomian rakyat yaitu aktivitas perdagangan dan jasa di dekat lokasi pembangunan Bendungan Pelosika yang berada di Kecamatan Asinua Jaya dan Kecamatan Ueesi yang tersedia fasilitas ekonomi untuk skala lokal yang cukup lengkap seperti pasar, pertokoan dan bank. Beberapa dampak lingkungan hidup yang diperkirakan terjadi dari kegiatan perdagangan dan jasa ini adalah terbukanya kesempatan usaha, peningkatan pendapatan dan perkembangan wilayah.

Perubahan Lahan

Pemanfaatan lahan di wilayah studi Pelosika dilakukan oleh petani baik untuk tanaman semusim maupun untuk tanaman tahunan, serta dalam bentuk monokultur dan secara tumpang-sari atau campuran. Penggunaan lahan di DAS Konawe Hulu menyesuaikan kondisi topografi ketersediaan air untuk irigasi dan air baku untuk pemukiman. Kawasan di sekitar lokasi rencana bendungan Pelosika umumnya merupakan lahan kering, sawah (tadah hujan) dan kebun serta jenis tanaman yang ditanam umumnya adalah padi dan jagung yang dilakukan saat ada air. Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan ini juga merupakan pemanfaatan sumberdaya alam berupa tanah dan lahan, yang turut memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Sedangkan di kebun pada umumnya ditanamai tanaman keras/pohon, antara lain coklat, lada, langsung, rambutan,

mangga, kelapa, cengkeh, mente, sagu, pisang, dll).

Alih Fungsi Lahan Menjadi Kawasan Proyek

Berdasarkan laporan Studi LARAP (2015) di wilayah areal genangan diperoleh data bahwa peruntukan lahan untuk pemukiman atau pekarangan sebesar 367,84 hektar, atau sekitar 8,16 % dari total lahan milik warga yang tergenang, untuk lahan kebun rakyat sebesar 4.013,69 hektar atau sekitar 89,03 % dari total lahan milik warga yang tergenang, sedangkan untuk persawahan hanya sekitar 126,67 hektar atau sekitar 0,281 % dari total tanah yang tergenang. Daerah Genangan: Adanya bangunan as bendungan dengan ketinggian 65 m maka akan terjadi peningkatan tinggi muka air sungai Konawe mulai dari badan bendungan menuju ke arah hulu, sehingga menenggelamkan sebagian area di tepi kiri-kanan sungai Konawe, mulai dari elevasi +86,00 (dasar sungai/tapak as bendungan) sampai pada elevasi +146,00. Dengan demikian terjadi pelebaran muka air sungai Konawe, karena genangannya makin meluas mencapai 4.884 ha. Selain luasan muka air sungai Konawe eksisting, maka terjadi penggenangan (LARAP, 2015) lahan milik warga masyarakat (312 KK) yang termasuk di 22 desa yang lahannya berada di tepian sungai Konawe (dan anak-anak sungainya) seluas 4500,21 ha meliputi: tanah pekarangan (367,84 ha), tanah persawahan (126,67 ha) dan tanah kebun seluas (4013,69 ha). Sedangkan luas hutan yang tergenang (selain luas muka air sungai Konawe eksisting) belum dihitung (LARAP, 2015). Dua puluh dua desa yang terkena proyek tersebut berada di Kecamatan Asinua dan Kecamatan Latoma (Kabupaten Konawe) serta Kecamatan Ueesi dan Kecamatan Uluiwoi (Kabupaten Kolaka Timur).

Adaptasi di Tempat Relokasi

Lahan untuk relokasi dari hasil investigasi tim LARAP (2015) tersedia seluas 5.361,30 ha. Posisi lahan ini tersebar dibagian hulu lokasi di masing-masing wilayah desa terdampak tertentu. Posisi lahan ini tersebar dibagian hulu lokasi di masing-masing wilayah desa terdampak tertentu. Rencana relokasi berada di

wilayah yang didominasi oleh areal perkebunan atau alang-alang. Warga terdampak yang mayoritas penghasilannya dari pertanian harus membuka lahan baru, yang memerlukan bibit tanaman dan pupuk dalam jumlah cukup banyak, guna bisa mendapatkan penghasilan yang setara dengan di lokasi sebelumnya. Dalam proses tersebut, warga terdampak mesti melakukan penyesuaian terhadap kondisi tanah di lokasi yang baru, termasuk membiasakan diri dengan suasana baru. Selain itu, dari segi mobilisasi warga untuk mendapatkan bahan-bahan keperluan sehari-hari di kota, berangkat ke lokasi kerja (perkantoran, swasta ataupun instansi pemerintah), warga terdampak harus menyesuaikan dengan rute dan biaya yang berbeda dengan di lokasi sebelumnya.

Wujud Kerjasama Pembangunan Pelosika

Sebagian wilayah terdampak belum melakukan kerjasama sampai sekarang. Karena belum ada informasi terbaru mengenai rencana pembangunan Bendungan Pelosika. Namun kalau kami baik itu pemerintah setempat, warga terdampak maupun masyarakat sekitar pembangunan Bendungan Pelosika yang tidak terdampak ingin dilibatkan dan membutuhkan kami pasti siap. Tentunya diperlukan perhatian terhadap warga terdampak dan warga di sekitar lokasi lahan yang tergenang. Tindak lanjut pembebasan lahan agar dilakukan dengan cermat demi keakuratan data.

Pelibatan Tenaga Kerja Lokal

Dengan adanya rencana pembangunan ini perusahaan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terdampak, sehingga masyarakat turut dilibatkan dalam proses pembangunan. Masyarakat dengan senang hati jika bisa dilibatkan langsung pada saat pembangunan, dengan adanya rencana pembangunan ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat disini. Kalau rencana kerjasama kami berharap ketika proses pembangunan dapat memanfaatkan SDM kami untuk bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, melibatkan masyarakat yang terdampak dalam proses pembangunan nanti, tentunya membantu untuk proses pergantian

lahan atau relokasi bagi masyarakat yang terdampak.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan ekonomi merupakan suatu hal yang sepenuhnya harus dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat terdampak. Bentuk kerjasama yang diharapkan adalah dengan melibatkan masyarakat terdampak untuk dipekerjakan agar taraf ekonominya meningkat. Warga terdampak maupun masyarakat sekitarnya berharap dibangun jalan akses yang baik di wilayah relokasi guna memperlancar perekonomian di lokasi baru tersebut.

Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan dan Pendampingan

Adanya pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat pada proses pembangunan, apalagi saya kira pemerintah desa itu selalu mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Ketika nanti terjadi pembangunan, harapan kita sebagai pemerintah desa supaya sumber daya lokal itu dimanfaatkan supaya ada kerjasama yang baik melalui pelatihan-pelatihan dasar, dalam artian yang digunakan sebagai tenaga kerja kalau untuk teknis-teknisnya tidak mungkin karena kita sumberdayanya ini terbatas, kecuali kita manfaatkan dulu yang masih bisa dimanfaatkan (tenaga kasarnya), makanya diperlukan pelatihan teknis dasar. Selain itu warga terdampak maupun masyarakat sekitarnya berharap ada sosialisasi dan pendampingan yang intens pada masyarakat.

Proses Relokasi

Kegiatan relokasi dimana proses relokasinya harus diperjelas kembali. Relokasi untuk kami menetap dan pindah dari area yang terendam. Selaku masyarakat kami mengikuti arahan dari pemerintah, selain daripada itu dimanapun nanti relokasi yang ditentukan pemerintah disitu nanti kami tinggal, selain itu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk sementara lokasi relokasi masih belum diketahui lokasinya dimana. Harus ada pendataan kembali jadi belum ada kejelasan lagi. Proses ganti untung harus jelas dan ada kesamaan tentang harga setiap daerah. Warga terdampak berharap ada pelibatan warga terdampak dalam pengambilan

keputusan penting seperti lokasi untuk relokasi dan penggantian bangunan, lahan dan tanaman milik masyarakat.

Pembangunan Saluran Irigasi

Mungkin kerjasama lain terkait irigasi semoga sampai ke semua desa untuk mengairi lahan pertanian masyarakat. Ketika bendungan Pelosika ini jadi kami dapat menggunakan airnya untuk lahan pertanian dan kebutuhan warga sehari-hari. Jika bendungan ini dalam proses pelaksanaan kami ingin bekerjasama dalam saluran irigasi agar wilayah kami dapat menggunakan air untuk lahan pertanian dan kebutuhan sehari-hari.

Tabel 2. Kegiatan dan Risiko yang Akan Ditimbulkan

No	Kegiatan/Aktifitas	Risiko yang Ditimbulkan	Mitigasi Risiko
Rencana Pembangunan			
1	Pertanian	Lahan Tenggelam saat musim hujan/banjir, gagal panen	Dibuatkan dan pemeliharaan saluran air
		Ganti untung yang tidak sesuai	Musyawarah dan kesepakatan yang difasilitasi oleh pemerintah dan diawasi oleh pihak yang netral tentang masalah penggantian lahan
2	Pembebasan lahan (rumah tinggal, sawah, ladang, dst)		Ganti untung yang sesuai baik dari segi nilai maupun lokasi
	- Proses ganti untung		Ganti untung langsung dengan pihak ketiga, jangan via pihak ketiga/caloe
		Aset hilang/terendam	Ganti untung sesuai nilai aset
		Lokasi tepat dan merugikan	Butuh sosialisasi yang jelas dan transparan terhadap masyarakat
			Pendampingan dan keadilan

No	Kegiatan/Aktifitas	Risiko yang Ditimbulkan	Mitigasi Risiko
3	Lahan Pekerjaan	Pekerja bukan penduduk yang telah tergusur	Pekerja mengutamakan dari masyarakat sekitar yang terdampak aktifitas pembangunan bendungan Lapangan kerja bagi warga yang terdampak langsung
4	Relokasi	Rencana Lokasi	Diharapkan tidak jauh dari tempat asalnya
		Sosialisasi	Kepastian lokasi relokasi disosialisasi kepada warga terdampak
5	Keterbukaan Informasi	Simpang-siur informasi yang beredar di masyarakat	Lakukan sosialisasi dari pihak yang terkait langsung dengan masyarakat

Dampak Saat Proses Pembangunan

1	Pertanian	Banjir, tanaman terendam	Dibuat saluran air sementara selama pelaksanaan pembangunan Masyarakat dilibatkan dalam sejak awal proses, sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi sejak awal
2	Legalitas	Legalitas lahan tidak lengkap/tidak ada	Pendataan awal, pendampingan dari tim ahli hukum
3	Informasi	Salah paham kesimpangsiuran informasi	Edukasi sejak awal hingga beroperasinya bendungan
4	Akses Transportasi	Jalan rusak akibat alat berat	Dibuatkan jalan alternatif Jalan yang ada dipelihara, perbaiki, dan ditingkatkan kualitasnya

Dampak Setelah Pembangunan

1	Lahan Pekerjaan	Kehilangan lahan pekerjaan	Diutamakan mempekerjakan
---	-----------------	----------------------------	--------------------------

No	Kegiatan/Aktifitas	Risiko yang Ditimbulkan	Mitigasi Risiko
			masyarakat yang terdampak
2	Saluran Distribusi	Pembagian aliran air tidak merata	Dibuat pengaturan dan jadwal pembagian aliran air

Tabel 2. Mitigasi Risiko

No	Kegiatan/Aktifitas	Risiko				Mitigasi Risiko
		Risiko yang ditimbulkan	Dampak	Kemungkinan	Risiko (Dampak x Kemungkinan)	
Rencana Pembangunan						
1	Pertanian	Lahan: Tinggalkan saat musim hujan/banjir, gigitan rayap	3	4	12	Risiko Sedang Dibuatkan dan pemeliharaan saluran air
2	Pembebasan lahan (terah tinggal, sawah, ladang, dll) - Proses ganti untung	Ganti untung yang tidak sesuai	4	4	16	Risiko Tinggi Masyarakat dan kecemasan yang ditimbulkan diantisipasi pihak yang terkait tentang masalah Ganti untung yang sesuai baik dari segi nilai & Ganti untung langsung dengan pihak ketertujuan
		Aset hilang/terendam	2	3	6	Risiko Rendah Ganti untung sesuai dengan nilai aset
3	Lahan Pekerjaan	Lokasi tidak tepat dan merugikan	3	4	12	Risiko Sedang Bibit sosialisasi yang jelas dan transparan ter Pengendalian dan kualitas
		Pekerja bolak pindah yang telah terganggu	4	4	16	Risiko Tinggi Pekerja mengutarakan dari masyarakat ke Masyarajat dibebaskan dalam sejak awal proses bisa melakukan mitigasi sejak awal
4	Informasi	Simpang-siur informasi yang beredar di masyarakat	2	3	6	Risiko Rendah Lakukan sosialisasi dan pihak yang ter masyarakat
Dampak Saat Proses Pembangunan						
1	Pertanian	Banjir, tanaman terendam	3	3	9	Risiko Rendah Dibuat saluran air sementara selama pelaksanaan Masyarakat dibebaskan dalam sejak awal proses bisa melakukan mitigasi sejak awal
2	Legalitas	Legalitas lahan tidak lengkap/tidak ada	2	3	6	Risiko Rendah Pembelian awal, pendampingan dari tim ahli &
3	Informasi	Salah paham kesimpangsiuran informasi	2	2	4	Risiko Sangat Rendah Edukasi sejak awal hingga terpenuhinya bisa
4	Akses Transportasi	Jalan rusak akibat alat berat	2	2	4	Risiko Sangat Rendah Dibuatkan jalan alternatif Jalan yang ada dipelihara, perbaiki, dan ditng
Dampak Setelah Pembangunan						
1	Lahan Pekerjaan	Kelebihan lahan pekerjaan	4	4	16	Risiko Tinggi Ditentukan pembebasan masyarakat yang
2	Saluran Distribusi	Pembagian aliran air tidak merata	2	2	4	Risiko Sangat Rendah Dibuat pengaturan dan jadwal pembagian air

Tabel 3. menunjukkan skala prioritas terkait mitigasi risiko, dimana ada beberapa komponen yang menjadi risiko tinggi yaitu terkait pembebasan lahan dan lahan pekerjaan pada saat rencana pembangunan, lahan pekerjaan dalam dampak setelah pembangunan. Ini menjadi penting bagi para stakeholder pada saat implementasi Bendungan Pelosika ini.

KESIMPULAN

1. Ringkasan mengenai jenis dampak sosial yang telah diidentifikasi, strategi mitigasi, monitoring dampak, peran para pemangku kepentingan lokal, serta uraian tindakan perlu dilakukan untuk melakukan perbaikan ke depan.
2. Masyarakat yang diperkirakan terkena dampak dari Pembangunan Bendungan Pelosika, menyetujui rencana pembangunan dengan syarat permintaan pendataan yang akurat sampai pembayaran tentang ganti rugi dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, transparan dan berkeadilan. Pada umumnya, masyarakat memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan Bendungan Pelosika dari pemerintah

3. Pengetahuan masyarakat hanya terbatas pada rencana pembangunan bendungan pelosika saja, sedangkan terkait dengan proses pembebasan lahan masih belum ada kepastian terkait dengan prosedur dan nilai ganti rugi, hal ini yang memberikan dampak resistensi atas sebagian masyarakat di wilayah terkena dampak. Masyarakat berharap agar dalam pelaksanaan pembangunan nanti, masyarakat lokal khususnya yang akan terkena dampak langsung, dapat berperan serta dan memperoleh manfaat dengan adanya pembangunan Bendungan Pelosika. Adanya kegiatan pembangunan ini diharapkan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan diharapkan akan terjadi peningkatan pembangunan wilayah mereka.
4. Sebagian masyarakat mengkhawatirkan terhadap proses nilai ganti rugi yang akan diterima, masyarakat jangan dirugikan oleh rencana kegiatan pembangunan Bendungan Pelosika. Secara umum, masyarakat juga menginginkan ganti rugi sesuai asas keadilan dan peraturan yang berlaku.
5. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa sudah ada rencana tempat relokasi untuk ditindaklanjuti dan selanjutnya untuk ditetapkan oleh Pemerintah. Pada umumnya warga terkena dampak memilih untuk direlokasi pada lokasi yang disepakati yang tidak jauh dari lokasi saat ini.
6. Masyarakat terdampak berharap dapat ikut serta dan mendapatkan manfaat dalam proses pembangunan Bendungan Pelosika. Selain itu, adanya kegiatan pembangunan ini diharapkan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan diharapkan akan terjadi peningkatan pembangunan wilayah mereka.
7. Masyarakat ada yang membuka warung makanan dan kios/toko di sekitar lokasi proyek. Masyarakat berharap agar ada peluang ekonomi akibat pembangunan proyek Bendungan Pelosika berupa peningkatan jual beli pada warung/kios/toko mereka. Penduduk sekitar

mempunyai peluang untuk ikut berperan serta sebagai penyedia makanan dan minuman dan barang kebutuhan sehari-hari para pekerja proyek nantinya.

8. Isu penting dalam manajemen risiko Bendungan Pelosika ini yaitu ada beberapa komponen yang menjadi risiko tinggi yaitu terkait pembebasan lahan dan lahan pekerjaan pada saat rencana pembangunan, lahan pekerjaan dalam dampak setelah pembangunan. Ini menjadi penting bagi para stakeholder pada saat implementasi Bendungan Pelosika ini.
9. Dilakukan pendekatan dan kerjasama dengan pemerintah daerah dari tingkat atas hingga tingkat bawah dan masyarakat di wilayah terdampak oleh berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan Bendungan Pelosika.
10. Mengikutsertakan forum koordinasi/ lembaga kemasyarakatan yang sudah ada. Peran tokoh adat/agama/masyarakat sangat penting dalam membantu kelancaran hal-hal yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga yang terkait dengan perselisihan warga atau masalah sosial lainnya.
11. Dilakukan proses pembebasan lahan sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku dan sesuai dengan sistem adat setempat yang terkait status kepemilikan tanah dan dilakukan dengan cermat demi kecuratan data.
12. Penetapan nilai ganti untung dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, sesuai harapan/keinginan masyarakat serta untuk mencegah timbulnya konflik yang bisa menghambat proses pelaksanaan proyek. Serta Penetapan relokasi warga terdampak harus diperjelas kembali dan diberikan lahan yang layak dan tertata sesuai cakupan desa-desa yang terdampak.
13. Hasil mitigasi resiko bahwa isu pembebasan lahan merupakan isu krusial, perlu ada pemutakhiran terkait dokumen pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan Bendungan Pelosika dan penyesuaian harga. Dokumen dibuat mengacu pada peraturan terbaru mengenai

DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu, R. (2020). Strategi institusional kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Amanna Gappa*, 12-20.
- [2] Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [3] Ayu, I. K., & Heriawanto, B. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(2), 122-130.
- [4] Bulba, A. T., & Oktaviani, C. Z. (2023). Faktor Keterlambatan Proses Pengadaan Tanah Terhadap Pencapaian Kinerja Proyek Strategis Nasional (PSN) Jaringan Irigasi Aceh. *Teras Jurnal: Jurnal Teknik Sipil*, 13(1), 245-252.
- [5] Dadi, M., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sihotang, A. P. (2023). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Lahan Pertanian. *Journal Juridisch*, 1(1), 33-45.
- [6] Dinata, I. W. W., Suwitra, I. M., & Sutarna, I. N. (2021). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Adat Saren, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 435-441.
- [7] Hasanah, U., Elyani, E., Waruwu, K., & Yudhira, A. (2021). Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 3(3), 217-222.
- [8] Muhasan, I., & Riandoko, R. (2023). Pendampingan Pengadaan Lahan Untuk Pembebasan Pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol. *Pengmasku*, 3(2), 128-135.
- [9] Nurpita, A., Wihastuti, L., & Andjani, I. Y. (2018). Dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan rumah tangga tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon

- Progro. Jurnal Gama Societa, 1(1), 103-110.
- [10] Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia*, 5(2), 376-394.
- [11] Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015). Laporan Sosial Budaya. STUDI LARAP (Land Acquisition Resettlement Action Plan) Bendungan Pelosika Kabupaten Konawe. Provinsi Sulawesi Tenggara.
- [12] Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015). Laporan Ringkasan Eksekutif. STUDI LARAP (Land Acquisition Resettlement Action Plan) Bendungan Pelosika Kabupaten Konawe. Provinsi Sulawesi Tenggara.
- [13] Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022. *Consultation for Special Studies and Detailed Design Stage of Pelosika Dam Project in Indonesia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- [14] Sugiyono (2018). Metode Manajemen Penelitian. Bandung; Alfabeta.
- [15] Sugiyono (2018). Metode Manajemen Penelitian Kebijakan. Bandung; Alfabeta.
- [16] Sugiyono (2018). Metode Manajemen Penelitian Evaluasi. Bandung; Alfabeta.
- Wicaksono, F. A., & Turisno, B. E. Penerapan Asas Keadilan Terhadap pengadaan Tanah Bagi Infrastruktur Jalan Tol Trans Jawa. *Notarius*, 16(3), 1756-1767.